

Optimalisasi Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Pelayanan Edukasi Kepada Masyarakat

Alifia Risha Lesmono^{1*}, Slamet Riyadi², Liling Listyawati³, Damajanti Sri Lestari⁴

^{1,3,4} Administrasi Negara, ² Doktor Manajemen, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Jl. Semolowaru No.84, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur

E-mail: alifiarishaa@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7463>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 June 2026

Revised: 29 June 2026

Accepted: 15 July 2026

Kata Kunci:

pengabdian masyarakat, Identitas Kependudukan Digital, IKD, pelayanan publik digital, MSIB

Keywords:

community service, Digital Population Identity, IKD, digital public services, MSIB

ABSTRACT

Transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai representasi digital Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Namun, implementasi IKD di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya literasi digital dan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 6 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan fokus pada edukasi dan pendampingan penggunaan IKD di wilayah Kecamatan Kenjeran. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi, aktivasi, dan pendampingan pemanfaatan IKD di tingkat kelurahan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai fungsi, manfaat, serta prosedur penggunaan IKD sebagai identitas kependudukan resmi berbasis digital. Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kegiatan ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan serta memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mendukung transformasi pelayanan publik berbasis e-government.

The digital transformation of population administration services represents a strategic effort by the government to improve efficiency and the quality of public services. One of the innovations developed is the Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) as a digital representation of the electronic Identity Card (KTP-el) with equal legal validity. However, the implementation of IKD at the community level still faces several challenges, particularly low digital literacy and public concerns regarding personal data security. This community service activity was carried out through the Certified Internship and Independent Study Program (MSIB) Batch 6 at the Population and Civil Registration Office of Surabaya City, focusing on education and assistance in the use of IKD in the Kenjeran District. The method applied was a participatory approach, in which students were directly involved in socialization, activation, and assistance for the utilization of IKD at the village level. The results indicate an increase in public understanding and awareness regarding the functions, benefits, and procedures for using IKD as an official digital-based population identity. In addition to providing direct benefits to the community, this activity also contributed to improving the quality of population administration services at the district level and strengthening the role of students as agents of change in supporting the transformation of e-government-based public services.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Alifia Risha Lesmono, et al (2026). Optimalisasi Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Pelayanan Edukasi Kepada Masyarakat, 5(1) 1239-1244. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7463>



PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak sipil masyarakat, mulai dari kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir menjadi dasar bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, serta penyediaan layanan publik yang efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, tertib administrasi kependudukan menjadi kebutuhan strategis yang harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selama ini, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) masih sangat bergantung pada bentuk fisik. Kondisi ini berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian, yang telah dapat dicetak secara mandiri menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 gram (Prasetyo et al., 2023). Meskipun dicetak secara mandiri, keabsahan dokumen tersebut tetap terjamin karena telah dibubuhi Tanda Tangan Elektronik (TTE) serta dilengkapi kode QR yang dapat dipindai melalui aplikasi pemindai pada *smartphone* untuk memverifikasi keaslian dokumen (Fildza & Noor, 2022).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia mendorong transformasi pelayanan administrasi kependudukan menuju sistem berbasis *digital*. Digitalisasi layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik, serta meminimalkan potensi kesalahan data. Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menghentikan penambahan blangko KTP fisik dan menggantinya dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kebijakan ini diambil untuk mengatasi permasalahan penerbitan KTP fisik yang selama ini masih sering menimbulkan keluhan di masyarakat (Yasah et al., 2025).

Salah satu bentuk inovasi dalam transformasi tersebut adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai representasi digital dari KTP-el yang memiliki kekuatan hukum yang sama. IKD merupakan informasi kependudukan dalam bentuk elektronik yang tersedia melalui aplikasi pada *smartphone* dan berfungsi sebagai representasi digital dari dokumen kependudukan fisik (Bella & Widodo, 2024). Kehadiran IKD dirancang untuk memberikan kemudahan akses identitas bagi masyarakat melalui perangkat digital, sehingga masyarakat tidak perlu lagi membawa dokumen fisik dalam berbagai keperluan pelayanan.

Selain memberikan kemudahan akses, IKD juga diharapkan mampu mendukung integrasi data antarinstansi serta meningkatkan keamanan dan validitas data kependudukan. Namun demikian, implementasi IKD di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, khususnya pada kelompok lanjut usia dan masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat pintar atau pemahaman yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi digital. Di samping itu, masih terdapat kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi, seperti risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi, yang menyebabkan keraguan dalam menggunakan IKD.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IKD tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem dan regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami manfaat IKD serta merasa aman dan percaya dalam menggunakannya. Edukasi yang dilakukan secara langsung di tingkat lokal dinilai lebih efektif karena dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) *Batch 6* sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktis di dunia kerja, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mendukung penyelesaian permasalahan publik. Keterlibatan mahasiswa dalam edukasi dan pendampingan IKD menjadi salah satu bentuk sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah dalam mendukung transformasi pelayanan publik.

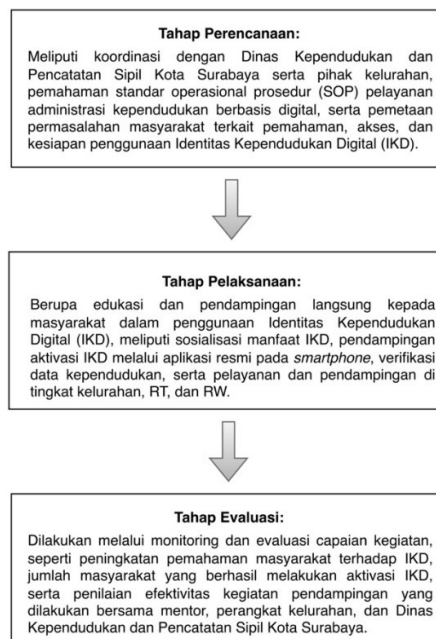
Di Kota Surabaya, khususnya di wilayah Kecamatan Kenjeran, pelaksanaan IKD masih memerlukan dukungan intensif dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa MSIB *Batch 6* yang ditempatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Surabaya berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui edukasi penggunaan Identitas Kependudukan Digital. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, mendorong aktivasi IKD, serta membantu masyarakat mengatasi kendala teknis yang dihadapi dalam penggunaan layanan digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan fokus pada edukasi dan pendampingan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai upaya mendukung transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang pelayanan publik, komunikasi sosial, dan literasi digital.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) *Batch* 6 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlokasi di wilayah Kecamatan Kenjeran, khususnya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Tambak Wedi, Sidotopo Wetan, dan Bulak Banteng. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, yaitu mahasiswa terlibat secara langsung dalam proses edukasi dan pendampingan masyarakat terkait penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pendampingan difokuskan pada sosialisasi, aktivasi, serta pemanfaatan IKD melalui aplikasi resmi pada *smartphone* sebagai upaya mendukung transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Program MSIB *Batch* 6 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, khususnya di wilayah Kecamatan Kenjeran, menunjukkan hasil yang positif dalam mendukung optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pendampingan Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pendampingan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Pendampingan dilakukan secara langsung di lingkungan tempat tinggal warga, sebagaimana terlihat pada dokumentasi kegiatan, di mana mahasiswa membantu masyarakat dalam proses sosialisasi, aktivasi, dan penggunaan IKD melalui aplikasi resmi pada *smartphone*.



Gambar 1. Pendampingan Masyarakat dalam Aktivasi dan Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat yang mengalami keterbatasan literasi digital dibimbing secara bertahap dalam memahami fungsi IKD, prosedur aktivasi, serta cara mengakses identitas digital sebagai pengganti KTP-el fisik. Pendampingan secara tatap muka memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, sehingga masyarakat dapat secara langsung menyampaikan kendala yang dihadapi, seperti kesulitan penggunaan aplikasi, keterbatasan perangkat, maupun kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi.

Hasil pendampingan menunjukkan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat IKD serta berkurangnya keraguan dalam memanfaatkan identitas digital sebagai dokumen resmi. Masyarakat mulai memahami bahwa IKD memiliki kekuatan hukum yang sama dengan KTP-el dan dapat digunakan dalam berbagai keperluan pelayanan publik. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mendukung percepatan transformasi pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan literasi digital masyarakat.

Edukasi Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Wilayah Kecamatan Kenjeran

Pelaksanaan edukasi masyarakat terkait penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah Kecamatan Kenjeran menunjukkan hasil yang positif dalam mendukung peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan berbasis *digital*. Kegiatan edukasi yang dilaksanakan di tingkat kelurahan menjadi bagian penting dari upaya mendekatkan informasi layanan IKD kepada masyarakat secara langsung dan kontekstual.

Edukasi pemanfaatan IKD di Kecamatan Kenjeran dilakukan melalui penyampaian media informasi visual berupa poster resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang berisi ajakan aktivasi dan pembaruan IKD, manfaat penggunaan IKD, serta informasi lokasi layanan aktivasi IKD. Media sosialisasi tersebut digunakan dalam kegiatan pelayanan di lingkungan kelurahan dan interaksi langsung dengan masyarakat, sehingga informasi dapat diterima secara lebih mudah dan dipahami oleh berbagai kelompok usia.



Gambar 2. Sosialisasi Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan melalui Media Informasi Resmi Dispendukcapil Kota Surabaya

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Kenjeran mulai memahami fungsi IKD sebagai identitas kependudukan resmi yang memiliki kedudukan hukum setara dengan KTP-el fisik. Melalui edukasi yang diberikan, masyarakat menjadi lebih mengetahui prosedur aktivasi IKD serta lokasi layanan yang dapat diakses, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, dan Sentra Pelayanan Publik (SPP). Hal ini mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk memanfaatkan IKD dalam mendukung kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan.

Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan edukasi ini juga berkontribusi dalam mengurangi keraguan masyarakat terhadap penggunaan identitas digital. Penyampaian informasi secara langsung di tingkat kelurahan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara mahasiswa dan masyarakat, sehingga pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan IKD dapat dijelaskan secara langsung. Kondisi ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan berbasis *digital*.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa edukasi pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah Kecamatan Kenjeran merupakan strategi yang efektif dalam mendukung tertib administrasi kependudukan dan transformasi pelayanan publik. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat peran mahasiswa MSIB sebagai agen edukasi dan pendamping dalam implementasi inovasi pelayanan publik di tingkat lokal.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penguatan Peran Mahasiswa

Keterlibatan mahasiswa MSIB *Batch 6* dalam kegiatan pendampingan IKD turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Mahasiswa terlibat langsung dalam membantu masyarakat memahami alur pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, memberikan penjelasan terkait fungsi dan manfaat IKD, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan petugas Dispendukcapil.



Gambar 3. Pendampingan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital oleh Mahasiswa MSIB

Melalui pendampingan tersebut, masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas dan terarah terkait pemanfaatan identitas digital dalam pelayanan publik. Di sisi lain, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam bidang administrasi publik, komunikasi pelayanan, serta implementasi transformasi digital di sektor pemerintahan. Kegiatan ini memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan sekaligus mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis teknologi.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) *Batch 6* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, khususnya di wilayah Kecamatan Kenjeran, telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Edukasi dan pendampingan yang dilakukan secara langsung di tingkat kelurahan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai fungsi, manfaat, serta prosedur penggunaan IKD sebagai identitas resmi yang memiliki kedudukan hukum setara dengan KTP-el fisik.

Pendampingan penggunaan IKD menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam membantu masyarakat mengatasi keterbatasan literasi digital serta mengurangi keraguan terkait keamanan data pribadi. Masyarakat menjadi lebih terbuka dan siap dalam memanfaatkan identitas digital untuk mendukung kebutuhan pelayanan publik. Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kegiatan pengabdian ini juga memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan melalui kolaborasi antara mahasiswa, perangkat kelurahan dan kecamatan, serta petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Di sisi lain, keterlibatan mahasiswa MSIB dalam kegiatan pengabdian masyarakat turut meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang administrasi publik, komunikasi pelayanan, dan pemahaman praktis mengenai transformasi pelayanan publik berbasis *e-government*. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mendukung tertib administrasi kependudukan, tetapi juga memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam implementasi inovasi pelayanan publik di tingkat lokal.

Adapun saran dari dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut: 1) Perlu dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital, agar pemanfaatan IKD sebagai identitas resmi berbasis digital dapat digunakan secara optimal dan merata. 2) Pemerintah kelurahan dan kecamatan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan RT/RW dalam pelaksanaan edukasi dan aktivasi IKD, sehingga proses pendataan, aktivasi, serta pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital dapat dilakukan secara lebih sistematis, merata, dan berkelanjutan di tingkat masyarakat. 3) Perguruan tinggi dan penyelenggara Program MSIB disarankan untuk terus mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis pendampingan pelayanan publik digital, khususnya terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD), dengan cakupan wilayah yang lebih luas, sehingga peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mendukung transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) skema Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 6 yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atas fasilitasi dan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan, serta kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan di wilayah Kecamatan Kenjeran yang telah mendukung terselenggaranya edukasi dan pendampingan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat.

Selain itu, terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing dan mentor lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta kepada para penelaah artikel atas masukan dan saran yang konstruktif sehingga artikel ini dapat disusun dan disempurnakan dengan baik.

REFERENSI

- Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). Implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam menunjang pelayanan publik masyarakat di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14–31.
- Fildza, S., & Noor, M. (2022). Implementasi Kebijakan Go Digital Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 19(2), 1–18.
- Prasetyo, S., Wijayanto, H., Khoirunnisa, K., Lukiyana, L., Ahmad, M., Suryani, S., Fauzi, A., Zebua, A. O., Akbar, A., & Pratiwi, D. (2023). Sosialisasi Pemuktahiran Dokumen Kependudukan Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di RW 010 Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. *PANDAWA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Yasah, A. D., Ardiana, P., Aprilia, D. I., Gunawan, D. A. F., & Pertiwi, V. I. (2025). Evaluasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 957–971.